



APLIKASI PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN KOORDINASI BERBASIS DIGITAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

Sehati Zendrato¹, Maria Magdalena Bate'e², Ardin Gea³, Idarni Harefa⁴

Alamat : Alamat: Jl. Karet No.30, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Korespondensi penulis: *sehati.zendrato85@gmail.com, maria.batee82@gmail.com, Ardingea@gmail.com, idarniharefa@gmail.com

Abstract administration still dominates organizational document management and creates various obstacles such as slow distribution, difficulties in archive retrieval, weak interdepartmental coordination, high operational costs, as well as low transparency and data security. This condition contradicts the demands of modern administration, which emphasizes the use of information technology. This study aims to design a digital-based application to improve administrative efficiency, analyze the application's contribution to interdepartmental coordination, identify the capability of digital systems in overcoming the weaknesses of manual management, and assess the alignment of the application with e-Government and SPBE (Electronic-Based Government System) principles. The research applied a qualitative approach through in-depth interviews with key informants and document studies, with thematic analysis based on modern administration theory, digital coordination, and SPBE regulations. The findings show that administrative digitalization through digital correspondence recording, integrated archive search, automatic notifications, data backup, and audit trail can overcome the weaknesses of the manual system. Digitalization has been proven to accelerate document distribution, simplify archive retrieval, enhance transparency, strengthen accountability, reduce operational costs, and improve interdepartmental coordination. The implementation of digitalized administration results in a significant transformation from a manual system that is slow, wasteful, and less accountable to a digital system that is faster, more efficient, transparent, secure, and cost-effective. The success of implementation is determined not only by technical aspects but also by compliance with SPBE regulations. Digitalization has been proven to positively impact the improvement of public service quality and organizational effectiveness.

Keywords: Digital-Based Application for Enhancing Administration and Coordination

Abstrak Administrasi manual masih mendominasi pengelolaan dokumen organisasi dan menimbulkan berbagai kendala seperti distribusi yang lambat, kesulitan pencarian arsip, lemahnya koordinasi antarbagian, tingginya biaya operasional, serta rendahnya transparansi dan keamanan data. Kondisi ini bertentangan dengan tuntutan administrasi modern yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi, menganalisis kontribusi aplikasi terhadap koordinasi antarbagian, mengidentifikasi kemampuan sistem digital dalam mengatasi kelemahan pengelolaan manual, serta menilai keselarasan aplikasi dengan prinsip e-Government dan SPBE. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumentasi, dengan analisis tematik berdasarkan teori administrasi modern, koordinasi digital, serta regulasi SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi melalui pencatatan surat digital, pencarian arsip terintegrasi, notifikasi otomatis, backup data, dan audit trail mampu mengatasi kelemahan sistem manual. Digitalisasi terbukti mempercepat distribusi dokumen, mempermudah pencarian arsip, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, menekan biaya operasional, serta memperlancar koordinasi antarbagian. Implementasi digitalisasi administrasi menghasilkan transformasi signifikan dari sistem manual yang lambat, boros, dan kurang akuntabel menuju sistem digital yang lebih cepat, efisien, transparan, aman, dan hemat biaya. Keberhasilan implementasi ditentukan tidak hanya oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesesuaian dengan regulasi SPBE. Digitalisasi terbukti berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas organisasi.

Kata Kunci: Aplikasi Peningkatan Administrasi dan Koordinasi Berbasis Digital.

Naskah Masuk: 03 Juni 2025; Revisi: 12 Juli 2025; Diterima: 11 November 2025; Tersedia: 15 Desember 2025; Terbit: 17 Januari 2026;

LATAR BELAKANG

Administrasi pemerintahan daerah merupakan elemen vital dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kelancaran pengelolaan administrasi dan komunikasi lintas bagian. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi menjadi semakin penting agar proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Transformasi digital dalam sektor pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem administrasi yang sebelumnya bersifat manual, lambat, dan rawan kesalahan. Implementasi teknologi dalam pengelolaan surat, arsip, serta koordinasi antar bagian tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta memudahkan pelacakan jejak kerja (audit trail). Di sisi lain, pelayanan publik yang baik dimulai dari manajemen internal yang tertata. Jika proses administrasi internal berjalan dengan lancar, maka layanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan lebih responsif dan berkualitas. Sekretariat Daerah sebagai pusat pengendali kegiatan administratif memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan nyata yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Aplikasi peningkatan administrasi dan koordinasi adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses kerja di instansi pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi dan koordinasi antar bagian. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu digital yang memungkinkan pengolahan surat, pengarsipan dokumen, pertukaran informasi, hingga pengaturan akses data dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kinerja instansi pemerintahan menjadi lebih efektif serta mampu menjawab tantangan birokrasi di era digital.

Menurut Kusnadi & Ma'ruf. (2017) E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan transformasi hubungan dengan masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Penggunaan teknologi ini dapat berupa internet, perangkat mobile, komputer, atau lainnya, yang membentuk distribusi layanan digital oleh pemerintah. Menurut Kristianto & Findawati (2022) Penerapan e-Government bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, meningkatkan kenyamanan, serta meningkatkan pendapatan negara dan/atau mengurangi biaya. E-Government berperan signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan sistem digital yang

mendukung pelaksanaan pemerintahan di masa depan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan ini mengatur prinsip tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan mendorong integrasi layanan digital antar instansi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional: Peraturan ini menetapkan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan e-Government, yang mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transformasi hubungan pemerintah dengan masyarakat dan sektor lainnya.

Dari definisi dan peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi peningkatan administrasi dan koordinasi merupakan implementasi dari e-Government yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan dalam administrasi pemerintahan.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara adalah unsur staf yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas utamanya meliputi koordinasi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara terdiri atas Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa Asisten, seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi beberapa bagian yang memiliki fungsi spesifik, di antaranya Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah. Sebagai contoh, Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penyusunan produk hukum daerah serta

memberikan pertimbangan hukum bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Bagian Pemerintahan menangani urusan pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah. Dasar hukum yang menjadi landasan operasional organisasi ini adalah Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan administratif, serta mendukung kelancaran tugas-tugas kepala daerah. Efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi merupakan faktor penting yang menentukan kualitas layanan publik serta pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan daerah. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Nias Utara, proses administrasi dan koordinasi di lingkup Sekretariat Daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah sistem pengelolaan surat yang masih dilakukan secara manual. Pencatatan, distribusi, dan pelacakan surat masuk dan keluar tidak terintegrasi dengan sistem digital yang memadai, sehingga rentan terhadap kehilangan data, keterlambatan distribusi, serta kesulitan dalam menelusuri status atau histori surat. Selain itu, koordinasi antar bagian atau instansi pemerintahan juga belum berjalan secara optimal. Kurangnya sinkronisasi komunikasi berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan dan kurang efisiennya alur administrasi pemerintahan. Permasalahan lainnya yang signifikan adalah kesulitan dalam proses pengarsipan dan akses informasi. Penyimpanan dokumen penting dalam bentuk fisik meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan data, serta menyulitkan pencarian kembali dokumen saat dibutuhkan. Sistem administrasi lama juga tidak memiliki pengaturan hak akses yang jelas, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan data dan inkonsistensi dalam manajemen informasi. Di sisi lain, absennya mekanisme pencadangan (backup) data yang rutin dan terstruktur memperbesar risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau kendala teknis lainnya.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat koordinasi antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara. Pengembangan aplikasi digital yang terpadu menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ini, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan modern. Berikut gambar identifikasi masalah.



Sumber di olah Peneliti 2025

Pelaksanaan administrasi dan koordinasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses administrasi persuratan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan alur kerja berjalan lambat, tidak efisien, serta menyulitkan penelusuran status dan histori dokumen. Kondisi ini meningkatkan risiko keterlambatan distribusi informasi dan kehilangan data yang seharusnya dapat diakses secara cepat dan akurat.

Di sisi lain, koordinasi antar bagian belum berjalan secara optimal akibat belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi. Komunikasi yang tidak sinkron antar unit kerja berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan serta menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kebijakan yang membutuhkan keterpaduan lintas bagian. Permasalahan tersebut diperparah oleh sistem pengarsipan dokumen yang masih berbasis fisik, sehingga rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan menyulitkan proses pencarian kembali arsip ketika dibutuhkan.

Selain itu, aspek keamanan dan keandalan data belum sepenuhnya terjamin. Tidak adanya pengaturan hak akses yang jelas serta ketiadaan mekanisme pencadangan data yang terstruktur meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan data penting. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang berjalan saat ini belum mendukung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana dituntut dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan aplikasi administrasi dan koordinasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperkuat koordinasi antar bagian, serta menjamin keamanan dan

keandalan data. Pengembangan sistem ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap tuntutan pelayanan publik di era digital.

KAJIAN TEORITIS

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu guna mendukung kebutuhan pengguna, khususnya dalam pengolahan data, komunikasi, dan penyediaan layanan digital. Menurut Hidayat dan Nugroho (2021), aplikasi dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan spesifik dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Dalam konteks pemerintahan, aplikasi berperan sebagai sarana utama digitalisasi proses administrasi dan pelayanan publik, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada sistem manual serta meningkatkan transparansi dan akurasi informasi.

Jenis aplikasi yang banyak digunakan dalam sektor pemerintahan meliputi aplikasi berbasis web dan mobile karena memiliki fleksibilitas tinggi serta mendukung akses lintas unit kerja. Prasetyo dan Anggraeni (2021) menyatakan bahwa aplikasi web sangat efektif digunakan dalam sistem administrasi pemerintahan karena mudah diintegrasikan dan dapat diakses secara real-time dari berbagai lokasi. Pemanfaatan aplikasi digital dalam administrasi pemerintahan mencakup pengelolaan persuratan elektronik, pengarsipan dokumen, pelaporan kegiatan, dan monitoring kinerja yang terdokumentasi dengan baik.

Transformasi digital dalam pemerintahan diarahkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Nugroho (2020) menjelaskan bahwa SPBE merupakan pendekatan strategis untuk mengatasi birokrasi konvensional yang lambat dengan memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan penerapan SPBE sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur teknologi (Rahmawati, 2020).

Administrasi dalam pemerintahan dipahami sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan informasi, sumber daya, dan proses kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Syafrudin (2021), administrasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan tata kelola organisasi. Digitalisasi administrasi memungkinkan proses pencatatan, pengarsipan, dan distribusi informasi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi, sehingga memperkuat akuntabilitas birokrasi.

Koordinasi berbasis digital merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelaraskan komunikasi dan pelaksanaan tugas antarbagian dalam organisasi

pemerintahan. Hidayat (2021) menyatakan bahwa koordinasi digital mampu meminimalkan miskomunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan melalui akses informasi yang seragam dan real-time. Senada dengan itu, Yuliana (2022) menegaskan bahwa koordinasi digital menciptakan rekam jejak kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk monitoring, evaluasi, dan audit kinerja. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi digital menuntut adanya SOP digital, integrasi sistem, keamanan data, serta dukungan kepemimpinan yang konsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi administrasi dan koordinasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara serta kebutuhan penerapan aplikasi berbasis digital dalam mendukung proses tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Menurut Sugiyono (2021), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara alamiah tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan proses administrasi, sistem koordinasi, serta kebijakan penerapan teknologi informasi di Sekretariat Daerah.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan koordinasi antarbagian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

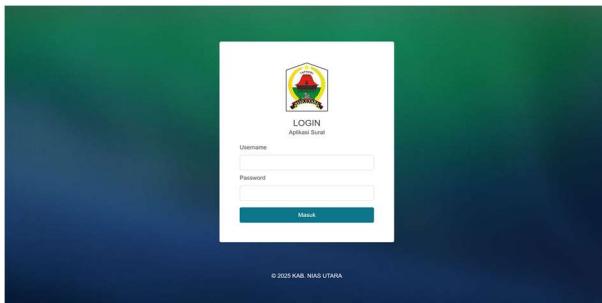
HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem administrasi manual telah menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas organisasi. Analisis menunjukkan lima aspek penting. Pertama, dari aspek efisiensi kerja, sistem manual memperlambat distribusi, pencarian, dan koordinasi dokumen. Hal ini berdampak pada waktu kerja yang lebih panjang dan pelayanan publik yang kurang optimal. Kedua, dari sisi biaya, penggunaan kertas, tinta, serta ruang penyimpanan fisik menciptakan pemborosan. Transformasi digital dinilai

mampu menekan biaya operasional melalui pengelolaan dokumen secara elektronik. Ketiga, dari segi transparansi dan akuntabilitas, sistem manual tidak mendukung adanya jejak audit. Dengan digitalisasi, audit trail dapat memastikan siapa yang mengakses dokumen dan kapan hal itu dilakukan. Keempat, dalam hal koordinasi, sistem manual menciptakan hambatan lintas bagian. Solusi digital dengan notifikasi, dashboard, dan forum komunikasi dapat mempercepat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Kelima, kesesuaian regulasi menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Implementasi aplikasi digital harus mengacu pada kebijakan SPBE dan e-Government agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

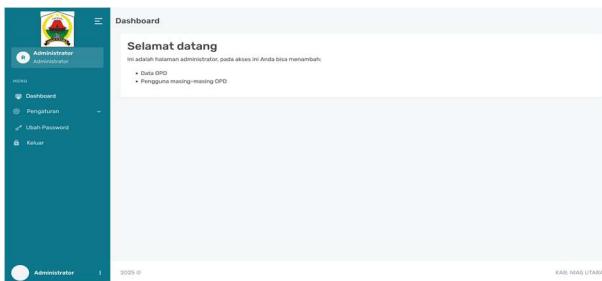
Aplikasi Peningkatan Administrasi dan Koordinasi Berbasis Digital pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara adalah sebuah platform yang dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan mengefisiensikan proses pengelolaan serta distribusi surat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah. Melalui aplikasi ini, setiap surat masuk dapat diproses dan didistribusikan secara digital kepada bagian terkait di dalam OPD, sehingga koordinasi antar unit kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

Form Login



Halaman awal aplikasi untuk masuk dengan akun sesuai peran: Administrator, Admin OPD, atau User Bagian.

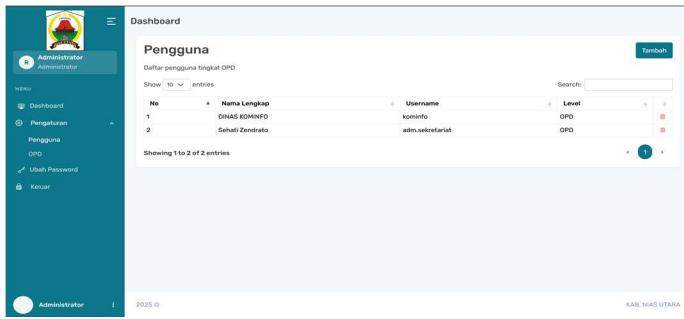
Halaman dashboard admin



Tampilan dashboard untuk akses administrator.

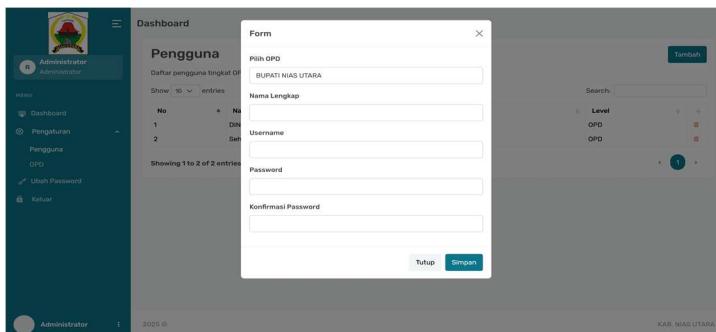
Halaman Daftar Pengguna

**APLIKASI PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN KOORDINASI
BERBASIS DIGITAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**



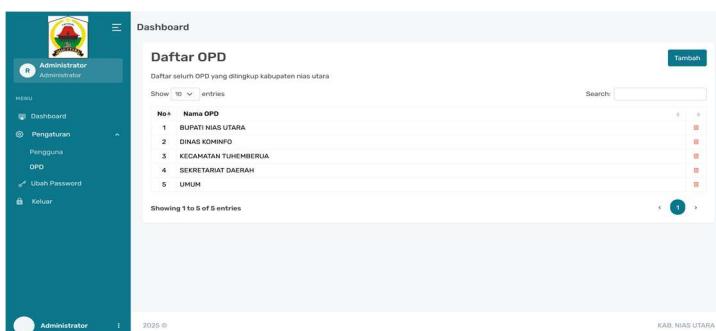
Pada halaman ini menampilkan semua akun pengguna beserta peran. Pada halaman ini bisa menambahkan atau menghapus pengguna.

Form Tambah Pengguna



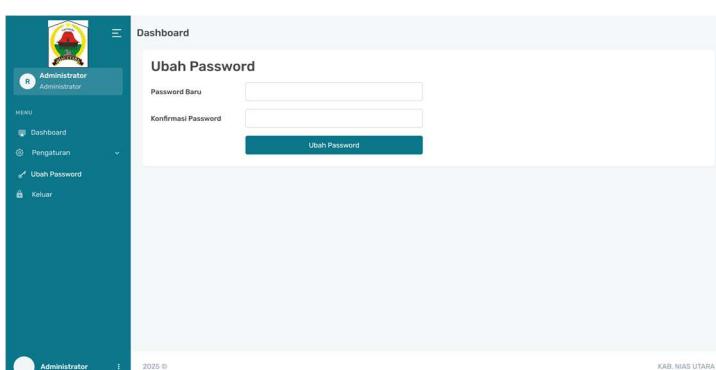
Form untuk membuat akun baru dengan data nama, peran, dan OPD terkait.

Daftar OPD



Berisi daftar OPD yang sudah terdaftar di aplikasi.

Ubah Password



Fitur mengganti kata sandi pengguna.

Dashboard OPD

The screenshot shows the 'Surat Masuk' section of the dashboard. It displays two entries:

No	Tanggal	Nomor Surat	Pengirim	Perihal
1	13/08/2025	001/CKC	UMUM	Undangan Pernikahan
2	18/08/2024	001/1234/SC	KECAMATAN TUHEMBERUA	Undangan

Below the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 entries'. There is a 'Tambah Surat Masuk' button at the top right and a search bar. The footer shows 'KAB. NIAS UTARA' and the date '2025'.

Tampilan khusus Admin OPD yang menampilkan statistik surat masuk, keluar, dan informasi penting OPD.

Form Membuat Surat Baru

This screenshot shows the 'Surat Baru' creation form. The fields are as follows:

- Tanggal Surat: 14/08/2025
- Nomor Surat: (empty input field)
- Perihal: (empty input field)
- Kepada: BUPATI NIAS UTARA
- File Surat (.jpg,.pdf): (Browse... button, No file selected)

A 'Kirim' button is located at the bottom. The footer shows 'KAB. NIAS UTARA' and the date '2025'.

Digunakan Admin OPD untuk membuat surat keluar lengkap dengan nomor, tanggal, tujuan, dan isi surat.

Halaman Surat Masuk

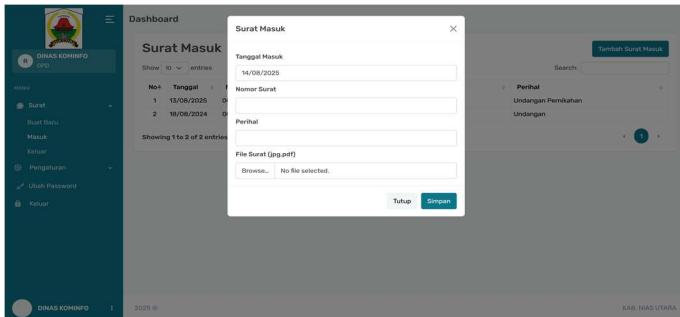
The screenshot shows the 'Surat Masuk' list again, identical to the one in the first screenshot. It lists the same two entries:

No	Tanggal	Nomor Surat	Pengirim	Perihal
1	13/08/2025	001/CKC	UMUM	Undangan Pernikahan
2	18/08/2024	001/1234/SC	KECAMATAN TUHEMBERUA	Undangan

Below the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 entries'. There is a 'Tambah Surat Masuk' button at the top right and a search bar. The footer shows 'KAB. NIAS UTARA' and the date '2025'.

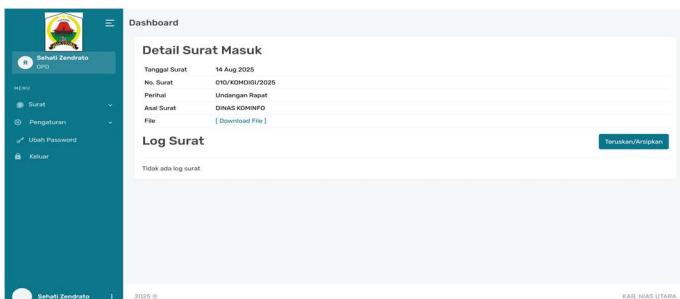
Menampilkan daftar surat masuk ke OPD, termasuk pengirim, tanggal, dan status.

Form Penambahan Surat Masuk Umum



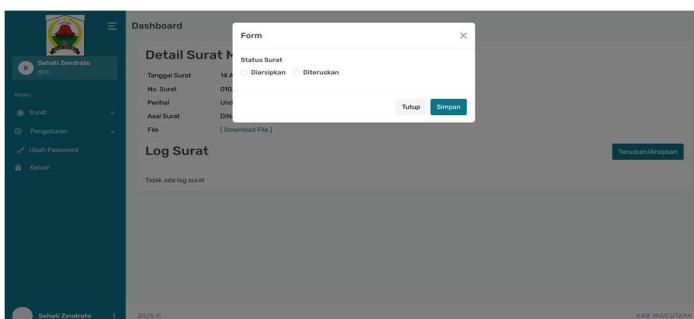
Digunakan untuk menambahkan surat masuk dari sumber manual/non-sistem.

Halaman Memproses Surat Masuk



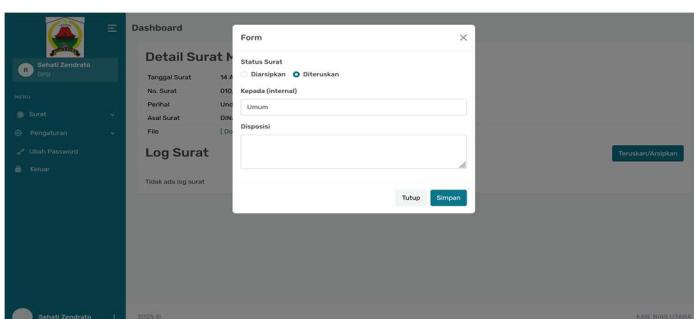
Fitur memverifikasi dan memutuskan tindak lanjut surat masuk.

Form Meneruskan atau arsipkan Surat Masuk



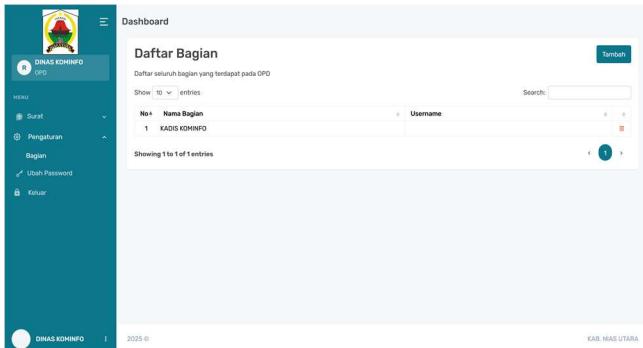
Pilihan untuk meneruskan surat ke User Bagian atau mengarsipkannya.

Form Surat Diteruskan



Menampilkan detail surat yang telah diteruskan kepada User Bagian.

Halaman Penambahan User Bagian pada OPD



Digunakan Admin OPD untuk menambah akun User Bagian di lingkup OPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi yang masih bersifat manual menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas kinerja organisasi. Proses distribusi dokumen yang lambat, kesulitan pencarian arsip, lemahnya koordinasi antarbagian, tingginya biaya operasional, rendahnya tingkat transparansi, serta keterbatasan keamanan data menunjukkan bahwa sistem manual tidak lagi relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.

Penerapan digitalisasi administrasi melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi terbukti mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Fitur-fitur seperti pencatatan surat secara digital, pengarsipan terintegrasi, notifikasi otomatis, pencadangan data, dan audit trail memberikan dampak positif terhadap percepatan alur kerja, kemudahan akses informasi, peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, serta efisiensi biaya operasional.

Dari sisi koordinasi, digitalisasi administrasi berperan signifikan dalam memperlancar komunikasi dan sinkronisasi kerja antarbagian. Pemanfaatan fitur notifikasi, dashboard pemantauan, dan media komunikasi daring mampu mengurangi hambatan birokrasi manual serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

Selain aspek teknis, kesesuaian dengan kerangka regulasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi digitalisasi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya

ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh dukungan kebijakan dan tata kelola yang tepat.

Secara keseluruhan, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi digitalisasi menunjukkan terjadinya transformasi yang nyata dari sistem administrasi yang lambat, kurang efisien, dan minim akuntabilitas menuju sistem yang lebih cepat, efisien, transparan, aman, hemat biaya, dan sesuai regulasi. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Agatha, F. (2024). Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Sekretariat Daerah Aceh. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Armando Julius, D. (2024). Efektivitas E-Office di Diskominfo Kota Tangerang. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Astuti, W. (2023). Implementasi E-Office di Sekretariat DKI Jakarta. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Bambang, D. A. (2019). Konsep E-Office untuk Birokrasi Digital di Salatiga. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Dewi, R., & Kurniawan, H. (2022). Administrasi Pemerintahan Modern. Jakarta: Mitra Pustaka.
- Fadillah, R. (2021). Strategi Implementasi Sistem Digital di Pemerintahan. Bandung: CV. Insan Cendekia.
- Fauzan, M. (2021). Tantangan infrastruktur teknologi informasi daerah. Jurnal Sistem Informasi Publik, 9(2), 99–110.
- Handayani, S. (2020). Digitalisasi administrasi di lingkungan pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 8(3), 45–53.
- Hardiyansyah, H. (2021). Evaluasi Sistem Pemerintahan Digital. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Hidayat, A. (2020, 2021). Koordinasi digital dalam birokrasi pemerintah. Jurnal Transformasi Pemerintahan, 6(1), 15–27.
- Ismail, M., & Rachmawati, N. (2022). Penggunaan Aplikasi Digital di Pemerintahan Daerah. Jakarta: Literasi Negeri.
- Kurniawan, A. (2020). Literasi Digital dan SDM Pemerintah. Yogyakarta: UAD Press.
- Lestari, M. (2020, 2022). SPBE dan infrastruktur pemerintah digital. Jurnal Reformasi Publik, 10(2), 75–90.
- Lubis, F. (2022). Kepatuhan penggunaan aplikasi pemerintah daerah. Jurnal Sistem dan Kebijakan Publik, 7(1), 25–36.
- Maulana, A. (2022). Strategi Implementasi E-Government di Pemerintah Daerah. Surabaya: Mitra Cendekia.
- Maulani, D. (2021). Efisiensi anggaran digitalisasi administrasi. Jurnal Administrasi Pemerintah, 5(2), 87–98.
- Mulyadi, A., & Fatimah, R. (2023). Wawancara dan evaluasi sistem digital. Jurnal Sistem Informasi Publik, 11(1), 22–35.
- Mulyadi, D. (2021). Teori dan Praktik Administrasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nasution, M. A., & Pramudito, A. (2022). Manajemen Proyek Sistem Informasi Publik. Jakarta: Penerbit Mandiri.
- Nugroho, R. (2020, 2021). SPBE dan Inovasi Pelayanan Pemerintah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nursavinah. (2024). Implementasi E-Office di Bappeda Riau. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Permana, B., & Widodo, A. (2023). Dokumentasi Proyek Teknologi Pemerintah. Malang: Teknologi Administrasi Press.
- Pranata Siregar, A. (2019). E-Surat di Sekretariat Pakpak Bharat Tengah. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Prasetyo, H. (2020). Keamanan Informasi dalam Infrastruktur Pemerintahan Digital. Yogyakarta: CV. Surya Media.
- Prasetyo, Y., & Anggraeni, R. (2021). Aplikasi web untuk pelayanan publik. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 9(3), 78–88.
- Putra, R., & Wahyuni, L. (2021). Database dan Sistem Informasi Pemerintah. Bandung: Informatika.
- Rahmawati, I. (2020). Kesiapan daerah terhadap implementasi SPBE. Jurnal E-Gov, 7(2), 33–46.
- Ramadhan, F. (2022). SOP Digital dalam Tata Kelola Pemerintah. Surabaya: Penerbit Negeri.
- Rohmah, S., & Subekti, H. (2021). Keterlibatan pengguna dalam sistem informasi pemerintah. Jurnal Administrasi dan Teknologi, 6(1), 20–34.
- Salbiyah. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rappocini. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Sari, M. (2020). Kendala Digitalisasi Pemerintah Daerah. Jakarta: Genta Media.
- Setiawan, B., & Lestari, R. (2022). Anggaran proyek sistem digital pemerintah. Jurnal Perencanaan dan Anggaran Daerah, 8(3), 45–55.
- Setiorini, D., & Aulianto, D. R. (2023). Arsip Digital di Sekretariat Kabupaten Tuban. Penelitian kualitatif deskriptif.
- Siagian, S. P. (2021). Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, D., & Kurniawan, R. (2022). Manajemen stakeholder dalam proyek teknologi pemerintah. Jurnal Teknologi Administrasi, 9(1), 10–22.
- Sugiyono. (2019, 2021, 2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, T. (2020). Audit trail dan transparansi administrasi digital. Jurnal Birokrasi Digital, 8(2), 55–66.
- Susanto, D. (2020). Infrastruktur teknologi dalam SPBE. Jurnal Sistem Informasi Terpadu, 6(1), 60–70.
- Sutarman. (2019). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, H. (2020, 2021). Interoperabilitas sistem informasi pemerintah. Jurnal SPBE Indonesia, 5(1), 43–58.
- Syafrudin, A. (2021). Konsep Administrasi Pemerintah Modern. Surabaya: Cendekia Mandiri.
- Wahyuni, D., & Hidayat, T. (2022). R&D dan Sistem Kerja Digital Pemerintah. Bandung: Digital Cipta.
- Widodo, J. (2022). Reformasi birokrasi dan administrasi digital. Jurnal Administrasi Pemerintah, 9(1), 20–33.
- Wijayanti, N. (2021). SDM dan Literasi Digital ASN. Jakarta: Pustaka ASN.
- Yuliana, R. (2020, 2022). Transformasi Digital dan Efisiensi Pemerintah. Bandung: Digital Nation Press.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan SPBE.